

## TUGAS M4

Gilberto Patrick Lie	50422622
Muhammad Tarmidzi Bariq	51422161
Jefta Mayeka Jodianno	50422736
Lius Harsen	50422810

A.

### 1. Teks

<https://www.kppod.org/article/view?id=21>

Praktik perizinan di Indonesia, terutama dalam konteks era desentralisasi, telah menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Perizinan dipandang sebagai manifestasi keterlibatan berlebihan negara yang memberlakukan aturan ketat, mengenakan beban finansial melalui pajak dan retribusi, serta menghambat kegiatan usaha dan masyarakat umum. Ungkapan "rezim perizinan" merujuk pada sistem administrasi negara yang menjadikan warga sebagai pemohon yang harus meminta izin, namun dalam prakteknya, menjadi sasaran penyalahgunaan kekuasaan yang mempersulit proses yang seharusnya mudah, memperlama proses yang seharusnya cepat, dan mencari peluang untuk mengeksploitasi keuangan rakyat melalui praktik pungutan ilegal hingga pungutan resmi.

### 2. Genre

Genre makro : Jurnal Penelitian

Genre mikro :

1. Pengantar
2. Esensi Reformasi Perizinan
3. Kasus di Provinsi DKI Jakarta
4. Dampak perubahan

## 5. Catatan akhir

Genre mikro diatas adalah eksposisi yang berisi informasi yang dimaksudkan untuk dideskripsikan secara jelas dan padat.

## 3. Pertanyaan

### 1. Apa itu reformasi perizinan di daerah?

- reformasi perizinan di daerah adalah bagian dari reformasi sektor publik, yakni berupa penataan institusi yang menjadi basis membangun daya saing dan kemudahan berusaha.

### 2. Sebutkan apa saja fungsi dari perizinan?

- alat pencegah atau pengendali dari pemerintah atas gagal-pasar (market failure) berupa monopoli yang merugikan obyek-obyek tertentu yang terlindung maupun tata kehidupan publik
- alat rekayasa pembangunan dimana izin menjadi instrumen negara dalam mengarahkan kegiatan usaha masyarakat berdasarkan pilihan prioritas sektor, lokasi, atau sebagai dukungan bagi pencapaian tujuan tertentu pemerintah
- dasar legal berusaha, termasuk sebagai dokumen yang mensyaratkan dalam hubungan dengan pihak ketiga dan menjadi jaminan perlindungan keamanan dari negara berdasar pemberian legalitas yang ada
- selain segala fungsi budgetair sebagai sumber pendapatan bagi negara/pemda.

### 3. Di dalam suatu deregulasi diharapkan dapat...

- meminimalisir tumpang-tindih kewenangan perizinan antar instansi
- mengurai konsentrasi kekuasaan pada satu unit tertentu yang lalu sulit dikendalikan oleh instansi lebih tinggi
- mencegah terjadinya kewenangan semu dalam rupa pemberian perizinan yang melampaui kewenangan sah suatu instansi.

B.

1. Teks

<https://www.kppod.org/article/view?id=10>

Reformasi birokrasi adalah satu segi pembaruan tata kelola sektor publik. Ciri kepublikan yang inheren dalam lanskap governansi membuat segala perkara reformasi menjadi urusan kolektif semua warga: tidak ada dominasi ekstrem, monopoli sepihak, dan kepentingan yang tak selalu dimenangkan secara mutlak. Fondasi demikian hendak dibangun kembali di aras lokal pada periode desentralisasi dan otonomi daerah. Salah urus dan kerusakan harus dikoreksi melalui reformasi tata kelola yang mengarahkan kebijakan, kelembagaan, dan pelayanan usaha pada penciptaan kesehatan lingkungan kerja yang produktif dan kompetitif pada aras daerah.

2. Genre

Genre makro : laporan penelitian / artikel ilmiah

Genre mikro :

1. Sektor publik, tata kelola, dan birokrasi
2. TKED: Capaian dan tipologi masalah
3. Reformasi birokrasi perizinan
4. Catatan penutup

Genre mikro diatas adalah argumentasi yang berisi pandangan atau opini penulis

3. Pertanyaan

1. sebagian tipologi masalah tata kelola di sejumlah indikator penting pada dasarnya dipengaruhi langsung oleh kinerja birokrasi. sebutkan apa saja?

- perihal infrastruktur
- dalam hak akses lahan
- para pelaku usaha, khususnya skala mikro-kecil, merasakan adanya manfaat program pengembangan usaha

- munculnya rezim pungutan lewat berbagai perda pajak, retribusi, sumbangan, dan sebagainya, yang menjamur di Indonesia era desentralisasi dan otonomi